

**LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI
KORUPSI (IPK) SEMESTER 2 TAHUN 2021**



**BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17 - MAKASSAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih jauh dari kata sempurna, karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial yang semakin berperan penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor pengontrol pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi layanan pemerintah melalui media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan cermat. Dengan melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi jalannya pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan publik yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan kediklatan. Berdasarkan hal tersebut Balai Diklat Industri Makassar melaksanakan survei IPK dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei Indeks Persepsi Korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan kediklatan serta meningkatkan kreadibilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Diklat Industri Makassar.

Adapun sasaran-sasaran Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Balai Diklat Industri Makassar
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik

C. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random sampling.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner online, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal dengan cara mengirimkan link/tautan kepada stakeholder (alumni diklat dan mitra pelatihan)
4. Kuesioner yang telah diisi dikirimkan ke petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
5. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
6. Tim survei mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Survei Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi penelitian ini adalah semua alumni dan mitra BDI Makassar (IKM, Industri, Dinas maupun Asosiasi) pengguna layanan Balai Diklat Industri Makassar, Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.
- B. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner online dengan jawaban tertutup. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.
- C. Variabel Pengukuran IPK Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang terdiri dari 7 ruang lingkup, antara lain:
1. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN;
 2. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang;
 3. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi;
 4. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif;
 5. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan;
 6. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan;
 7. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan;
- D. Teknik Analisis Data Analisis data pada pengukuran INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) di Balai Diklat Industri Makassar ini digunakan analisis statistic deskriptif. Ketujuh ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 7 item, dengan empat option jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.

Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Balai Diklat Industri Makassar ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Bersih dari korupsi
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Bersih dari korupsi
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Bersih dari korupsi
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100	A	Sangat Bersih dari Korupsi

BAB III

HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 131 . Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Balai Diklat Industri Makassar dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Balai Diklat Industri Makassar sebesar 3,61 berada pada kategori A “ SANGAT BERSIH DARI KORUPSI” (pada interval 76.61 s/d 88.30).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 7 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 2 Rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN	3,52	Bersih Dari Korupsi	6
2	Pelayanan Tidak Diskriminatif	3,4	Bersih Dari Korupsi	7
3	Petugas Pelayanan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan	3,61	Sangat Bersih Dari Korupsi	4
4	Pelayanan tidak terdapat pungli	3,75	Sangat Bersih Dari Korupsi	2
5	Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi	3,56	Sangat Bersih Dari Korupsi	5
6	Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan	3,76	Sangat Bersih Dari Korupsi	1
7	Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang Diberikan	3,67	Sangat Bersih Dari Korupsi	3
	Rata-rata	3,61	Sangat Bersih dari korupsi	

A. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operational Prosedur) yang tidak mengindikasikan adanya penyimpangan terutama Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,52 berada pada interval skor 3.06 s/d 3.53 kategori “Bersih dari Korupsi” Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup “Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN” berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	1	1,527%
2	Kurang Setuju	3	2,290%
3	Setuju	54	41,221%
4	Sangat Setuju	73	55,725%
JUMLAH		131	100

B. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif

Dalam memberikan pelayanan petugas tidak membeda-bedakan penerima layanan, semua disamakan sesuai dengan prosedur. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,4 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,53 kategori “Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	4	3,05%
2	Kurang Setuju	9	6,87%
3	Setuju	49	37,40%
4	Sangat Setuju	69	52,67%
JUMLAH		131	100

- C. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang
 Dalam memberikan pelayanan, semua tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya permintaan “tanda terimakasih/biaya administrasi”.
 Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,61 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup “Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang” berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
 Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	1	0,76%
2	Kurang Setuju	1	0,76%
3	Setuju	46	35,11%
4	Sangat Setuju	83	63,36%
JUMLAH		131	100

- D. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan
 Dalam memberikan pelayanan petugas tidak melakukan pungutan liar baik saat menerima laporan maupun saat melakukan pelayanan kediklatan, semua sesuai dengan prosedur. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,75 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
 Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	0,76%
3	Setuju	19	14,50%
4	Sangat Setuju	111	84,73%
JUMLAH		131	100

- E. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi
 Dalam memberikan pelayanan kediklatan tidak melalui perantara atau jalur tidak resmi. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,56 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
 Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	6	0,76%
3	Setuju	44	14,50%
4	Sangat Setuju	81	84,73%
JUMLAH		131	100

- F. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan.
 Dalam memberikan pelayanan petugas tidak meminta uang ataupun barang kepada pihak penerima kediklatan setelah melakukan pelayanan kediklatan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,76 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
 Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	32	24,43%
4	Sangat Setuju	99	75,57%
JUMLAH		131	100

- G. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Dalam setiap memberikan pelayanan kediklatan, petugas melakukan penolakan atas pemberian uang atau barang dari penerima layanan atas kediklatan yang telah diberikan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,67 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yangdiberikan berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.
- Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	1	0,76%
2	Kurang Setuju	1	0,76%
3	Setuju	38	29,01%
4	Sangat Setuju	91	69,47%
JUMLAH		131	100

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada layanan Kediklatan di Balai Diklat Industri Makassar sebesar $A = 3,61$ dan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN di Balai Diklat Industri Makassar berada pada kategori "Bersih dari Korupsi"
2. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang di Balai Diklat Industri Makassar berada pada kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi"
3. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi"
4. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori "Bersih Dari Korupsi".
5. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi"
6. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi".
7. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi".

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan Kediklatan di Balai Diklat Industri Makassar, berdasarkan peringkat ruang lingkungnya, diperoleh penilaian responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan" disusul ruang lingkup "Petugas Pelayanan menolak pemberian uang / barang terkait pelayanan yang diberikan".

- B. Rekomendasi Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Balai Diklat Industri Makassar, hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN dan Petugas Pelayanan tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil survei ini, keempat ruang lingkup tersebut berada pada kategori Bersih Dari Korupsi, belum mencapai Sangat Bersih Dari Korupsi.

ANALISA DATA SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Nama Instansi : Balai Diklat Industri Makassar

A. Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Alumni	109	83%
2	IKM/Industri/Asosiasi	18	3%
3	Pemerintah Daerah	2	14%
JUMLAH		131	100,00

B. Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	
		F	%
1	Laki - Laki	56	43%
2	Perempuan	75	57%
JUMLAH		131	100

C. Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	
		F	%
1	SMP	4	3
2	SMA	57	43,5
3	D1	0	0,00
4	D3	11	8,5
5	S1	59	45
6	S2	0	0,00
7	S3	0	0,00
JUMLAH		131	100

o Respo nde n	Pertanyaan Survey						
	4.Prosedur Pelayanan yang memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN	5. Pelayanan Tidak Diskriminatif	6. Petugas Pelayanan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan	7. Pelayanan tidak terdapat PUNGLI	8. Tidak terdapat praktik pencaloan / perantara yang tidak resmi	9. Petugas pelayanan tidak menuntut imbalan atas pelayan yang diberikan	10. Petugas pelayanan menolak pemberian uang / barang terkait pelayanan yang diberikan
1	3	3	3	3	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	4	4	4	4
8	4	4	4	4	2	4	1
9	4	3	3	4	3	3	3
10	4	1	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4
13	3	4	4	4	4	4	3
14	3	3	3	3	3	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4
18	3	2	4	4	3	4	3
19	4	4	4	4	4	4	4
20	3	2	3	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4
24	3	4	4	4	4	4	3
25	3	4	3	3	3	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4
27	1	1	4	4	4	4	4
28	4	3	3	4	3	3	3
29	3	3	4	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3
31	4	4	4	4	2	4	4
32	4	3	3	4	4	4	3
33	4	4	3	3	3	3	3
34	4	3	3	4	3	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4
37	4	3	4	4	3	3	4
38	3	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4
40	3	3	3	4	4	4	4
41	4	3	3	3	3	3	3
42	3	2	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	4	4	4	4	4
47	3	3	4	4	3	4	3

48	3	3	3	3	4	3	3	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4
50	3	4	4	4	4	3	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	3	3	3	3	3	4	4
53	3	2	3	3	3	3	3	3
54	4	2	4	2	2	2	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	4	4	4	4	4	4
57	3	3	4	3	3	3	3	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	3	4	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	2	2	3	3	2	2	3	3
65	4	4	4	4	4	4	4	4
66	3	3	4	4	3	3	3	3
67	4	4	4	4	4	4	4	4
68	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4
72	3	3	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	2	4	4	2	2	4	4
76	3	2	3	4	4	4	4	3
77	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	4	3	3	3
79	3	3	3	3	4	3	3	3
80	4	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4
82	3	3	1	4	4	4	4	4
83	3	4	4	4	4	4	4	2
84	4	1	4	4	4	4	4	4
85	3	2	4	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3
87	2	3	3	3	3	3	3	3
88	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4
90	3	3	3	3	3	3	4	3
91	3	3	3	3	4	3	4	3
92	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	1	4	4	3	3	4	4
94	3	3	3	3	3	3	3	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	3	4	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	4
99	3	3	3	3	4	2	3	3
100	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	3	3	4	4
102	4	4	4	4	4	3	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4
104	3	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	3	3	3	4	4	4
106	3	3	4	4	4	4	4	4
107	4	3	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4
109	3	3	3	3	3	3	3	3
110	3	4	4	4	4	4	4	4

111	3	3	3	4	3	4	3
112	3	3	3	3	3	3	3
113	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4
115	2	3	3	4	3	4	3
116	3	3	3	3	3	3	3
117	4	3	3	3	4	3	4
118	4	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	3	3	4
126	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	3	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4
131	3	3	2	3	3	3	3
Rata-rata	3,52	3,40	3,61	3,75	3,56	3,76	3,67
Indeks Persepsi Korupsi Semester 2 Tahun 2021			3,61				